

KERJASAMA INDONESIA-THAILAND DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA MENUJU DRUG-FREE ASEAN 2015

Sarah Tabitha¹, Nurmasari Situmeang², Wiwiek Rukmi Dwi Astuti³

Sarahtabitha@upnvj.ac.id, Nurmasarisitumeang@upnvj.ac.id, wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The drug problem which is a problem from year to year is increasingly complex and makes the drug problem a transnational problem which to eradicate it requires cooperation from various international and national layers. ASEAN as a Southeast Asian organization realizes one of the organization's ideals, namely a Southeast Asian region that is free from drugs through the Drug Free ASEAN 2015's declaration is committed to strengthening cooperation in overcoming drug abuse with a jointly designed work plan. In its implementation, Indonesia and Thailand hold cooperation with the hope of eradicating drugs in both countries, because as we know that the drug problem cannot be carried out alone. In cooperation, Indonesia and Thailand carried out several activities that were considered effective enough to help overcome this crucial problem. The journal of this research is a qualitative journal using the theory of Regionalism and International Cooperation in its analysis which results in the conclusion that the Cooperation between Indonesia and Thailand is apart from the current massive condition of the drug problem, Cooperation between Indonesia and Thailand is running effectively with the attitude of the two countries being cooperative and various ongoing activities. in accordance with the ideals of both countries.

Keyword: Indonesia-Thailand Cooperation, Drugs, ASEAN, Drug Free ASEAN 2015

ABSTRAK

Persoalan narkoba yang menjadi persoalan dari tahun ke tahun kian menjadi kompleks dan menjadikan persoalan narkoba menjadi permasalahan transnasional yang untuk memberantasnya dibutuhkan Kerjasama dari berbagai lapisan internasional maupun nasional. ASEAN sebagai organisasi Asia Tenggara mewujudkan salah satu cita-cita organisasi yaitu Kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba melalui deklarasi Drug Free ASEAN 2015 berkomitmen mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan workplan yang telah dirancang bersama. Dalam implementasinya Indonesia bersama Thailand mengadakan Kerjasama dengan harapan pemberantasan narkoba di kedua belah negara, karena seperti yang kita ketahui bahwa persoalan narkoba tidak dapat dilaksanakan sendiri. Dalam kerjasamanya Indonesia dan Thailand melakukan beberapa kegiatan yang nilai cukup efektif dilakukan untuk membantu adanya penanggulangan permasalahan yang krusial ini. Penulisan penelitian ini merupakan penulisan kualitatif dengan menggunakan teori Regionalisme dan Kerjasama Internasional dalam analisisnya yang menghasilkan kesimpulan bahwa Kerjasama Indonesia dan Thailand terlepas dari kondisi kemasifan persoalan narkoba saat ini, Kerjasama diantara Indonesia dan Thailand berjalan efektif dengan sikap kedua negara yang kooperatif dan berbagai kegiatan yang berjalan sesuai dengancita-cita kedua negara.

Keyword: Kerjasama Indonesia-Thailand, Narkoba, ASEAN, Drug Free ASEAN 2015

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika obat-obatan terlarang (NARKOBA) ataupun NAPZA (Narkotika, Psikotropika, serta Zat Aditif) telah jadi fenomena global serta ialah ancaman kemanusiaan (human threat) untuk sesuatu negeri, tidak terlepas juga ASEAN mendapatkan masalah yang sangat berbahaya berdasarkan nilai atau jumlah pengguna yang semakin naik setiap tahunnya. Pemicu dari kenaikan dan meluasnya penyalahgunaan narkotika adalah kecanggihan teknologi data, dimana pemasok, pengedar dan pengguna dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah melalui internet. Jumlah populasi manusia di ASEAN terus meningkat tiap tahunnya dan merupakan yang tertinggi ketiga setelah China dan India. Dari total populasi ASEAN, 65,6 pengguna narkotika dirawat per 100.000 populasi pada tahun 2019.

Indonesia berada di jalur internasional perdagangan dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain wilayah nusantara ditambah dengan alam dan manusia yang ada sumber daya, Indonesia juga merupakan daerah potensial untuk transit. Masalah penting di Indonesia adalah kebijakan di Negara Indonesia yang mana dianggap masih kurang dalam penanganannya narkotika serta kondisi peredaran narkotika di Indonesia jelas sangat mempengaruhi pasar narkotika Asia Tenggara. Sebanyak 6.359 klien dirawat di perawatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia selama tahun 2006.

Thailand pun menjadi salah satu dari negara segitiga emas atau gold triangle Myanmar dan Laos. Kedua negara ini menjadi sumber terbesar dunia dari hasil narkotika dan obat-obatan terlarang seperti opium. Daerah pegunungan yang

berbatasan dengan Laos, Myanmar dan Thailand dikenal sebagai daerah penanaman dan pemasaran opium selama berabad-abad. Menurut Taskariana (2010: 205), kawasan gold triangle memiliki lahan penanaman opium dengan luasnya yaitu 190.520 hektar dan dapat memproduksi 2.790 kg pasta opium per tahunnya. Selain itu, turunan bahan utama untuk menghasilkan heroin dan morfin berasal dari turunan pasta opium.

Seiring dengan situasi narkoba yang sudah mengancam kehidupan serta kecenderungan globalisasi, yang mengakibatkan perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai '*transnational organized crime*' menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* (BNN, 2018). Perkembangan tersebut membuat pemberantasan narkoba menjadi lebih kompleks.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-33 pada Juli 2000, Pemerintah menegaskan keprihatinannya terhadap ancaman dari pembuatan, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN dan sepakat untuk memajukan sasaran tahun mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba hingga tahun 2015. Kemudian daripada itu dibentuklah sebuah *workplan* sebagai acuan negara-negara ASEAN menyikapi Drug Free ASEAN 2015 ini.

Selaku sesuatu komitmen kawasan, tiap negeri anggota ASEAN tercantum Indonesia serta Thailand membagikan sokongan politik secara penuh buat bersama-sama mengalami ancaman peredaran hitam narkotika serta obat-obatan terlarang demi keamanan serta

stabilitas kawasan ini menampilkan terdapatnya upaya berkontribusi dalam upaya pencapaian sasaran Drug Free ASEAN 2015. Berangkat dari persoalan tersebut Drug Free ASEAN 2015 yang telah disetujui serta diresmikan oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai bentuk usaha dalam pemberantasan persoalan narkoba di ASEAN dengan upaya mengurangi peredaran serta penggunaan narkoba yang selama ini dialami oleh negara-negara ASEAN. Dengan bergabungnya Indonesia dan Thailand dalam deklarasi Drug Free ASEAN 2015 merupakan salah satu upaya Kerjasama yang terjalin dalam pemberantasan narkoba. Kerjasama kesepakatan kedua negara ini berdasarkan pada deklarasi Drug Free ASEAN 2015.

KERANGKA ANALISIS

Dalam menganalisa skripsi yang berjudul “Kerjasama Indonesia-Thailand dalam Pemberantasan Narkoba Menuju Drug Free ASEAN 2015” konsep pertama yang digunakan adalah kerjasama internasional yang dielaborasi dengan konsep kerjasama bilateral. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya Kerjasama dalam pemberantasan kejahatan narkoba yang termasuk dalam kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara dalam peredaran serta produksinya. Definisi dari kerjasama internasional sangatlah luas bukan hanya mengenai kegiatan saling membantu antar negara atau lembaga melainkan semua pihak atau aktor yang tergabung harus bekerjasama secara kooperatif dengan mempertimbangkan segala pendapat dan tidak mengambil keputusan secara

sepihak. Pada hakikatnya suatu negara tidak dapat berdiri sendiri sehingga dapat dipastikan setiap negara memerlukan bantuan dari negara lain.

Konsep yang kedua adalah *regionalism*. Seiring berjalannya waktu dan adanya pergeseran peran dalam sistem internasional yang menjadikan integrasi regional sebagai sebuah paradigma, dimana kepentingan kelompok menjadi hal yang utama. Kemudian, paradigma akan integrasi regional tersebut dituangkan dalam kerjasama regional di beberapa kawasan di dunia yang cenderung mengarah pada konstelasi kepentingan ekonomi-politik. Kemudian contoh dari adanya usaha untuk memperkuat jaringan politik-ekonomi yang menjadi tujuan bersama ialah organisasi ASEAN. Dari organisasi ASEAN terciptalah cita-cita bersama salah satunya menjadikan Kawasan Asia Tenggara menjadi Kawasan bebas narkoba, oleh sebab itu diciptkannya deklarasi bersama Drug Free ASEAN 2015 dengan *workplan* yang disusun bersama sebagai dasar kegiatan anti narkoba yang diharapkan setiap negara anggota turut aktif dalam mewujudkannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah rencana yang dimulai dari tahapan hipotesis berlanjut pada penghimpunan data serta analisis dan kesimpulan. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu masalah dibandingkan dengan melihat permasalahan untuk penelitian secara generalisasi. Metode dari penelitian kualitatif menggunakan teknik mendalam atau yang disebut dengan *in-depth analysis*. Peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif sebab dalam penelitian ini kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang terjalin diantara dua negara yakni Indonesia dan Thailand.

Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dapat memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang di teliti, dalam hal ini pemberantasan narkoba melalui program *drug-free* ASEAN yang diselenggarakan pada tahun 2015. Menurut Sugiyono (2010) dengan melalui data deskriptif, peneliti dapat mengidentifikasi sebuah fenomena sosial yang terjadi. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif yakni mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi temuan penelitian. Didalam penelitian ini, peneliti mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dari permasalahan atau keadaan dan posisi dari suatu kejadian atau peristiwa yaitu pemberantasan narkoba. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu penelitian yang pusat perhatiannya berfokus kepada permasalahan-permasalahan narkoba dan kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam program *drug-free* ASEAN 2015 dan hasil penelitian yang kemudian diolah lalu dianalisis untuk dapat diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Narkoba di Thailand

Narkoba yakni menjadi salah satu kategori ancaman keamanan non tradisional yang sekaligus menjadi fenomena global diseluruh pelosok negara salah satunya Asia Tenggara. Terdapat segitiga emas yang biasa disebut

dengan The Golden Triangle yang terletak pada daerah Thailand Utara, Laos bagian barat dan Myanmar bagian timur lokasi ini lah dimana narkoba jenis heroin dan amphetamine diproduksi dan disebarakan bukan hanya ke kawasan Asia Tenggara tapi ke seluruh kawasan global (BNN, 2009).

The Golden Triangle ini memasok sejumlah besar narkoba, semisal: pil shabu ke seluruh wilayah dan sejauh Eropa dan Australia, yang memiliki tingkat kecanduan per kapita tertinggi di dunia. Ini berarti bahwa sebagian besar produksi shabu di Asia Tenggara memenuhi permintaan regional, tetapi sejumlah besar juga diperdagangkan ke bagian lain dunia karena pasar yang tumbuh secara aktif. Hal ini sangat relevan di era integrasi regional saat ini dan pengurangan pembatasan perbatasan di Asia Tenggara, yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan perdagangan narkoba dan prekursor lintas batas. Thailand pada daerah utara menjadi pintu utama bagi perdagangan narkoba di Thailand. Bermula sejak komunitas etnis utara berinteraksi, dibawahlah obat-obatan terlarang tersebut seperti ganja, opium. Penyalahgunaan narkoba disebabkan karena adanya faktor mendukung yaitu ketersediaan obat-obatan dan narkoba oleh beberapa faktor yakni adanya ketersediaan obat-obatan di Thailand secara bebas dan luas sehingga diperjualbelikan karena memberi hasil keuntungan besar. Karena begitu, Thailand masuk kedalam jangkauan jaringan mafia narkoba internasional dan memiliki kaum atau gerakan separatis yang mendanai para petani untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Penyalahgunaan narkoba di Thailand sendiri memiliki grafik yang naik turun, puncak tingginya kenaikan ini terjadi

pada 2009 sampai 2011 dimana kenaikan secara signifikan terjadi dari 140.000 hingga 160.000 kejadian. Sementara survei sendiri membuktikan adanya pencapaian sebesar 157 ha peredaran atau produksi di Thailand bagian utara ditemukan pada 10 provinsi bagian utara (UNODC, 2006). Ukuran wilayah budidaya opium di Thailand pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 288 ha, mendapatkan sedikit kenaikan dari 231 ha di tahun 2007. Dibandingkan dengan 3,6 ton di tahun 2007, terjadi peningkatan penghasiian opium di tahun 2008 sebanyak 15,6 kg/ha. Namun, pada tahun 1998 sekitar 98% poppy sudah dilynaypkan dengan pengadaaan opium bersih sekitar 56 kg. Dengan adanya informasi bahwa selama 2 tahun penuh akan ada kenaikan budidyaa opiumn poppy secara signifikan, maka pihak berwenang coba untuk melakukan sosialisasi mengenai rencana pengendalian tanaman yang fokusnya dalah melakukan program penanaman di wilayah terpencil dan daerah di Utara Thailand yang ditumbuhi tanaman opium.

Perkembangan Narkoba di Indonesia

Berdasarkan riset yang dilakukan BNN pada tahun 2011 didapatkan bahwa penggunaan narkoba di Indonesia telah mencapai sebanyak 4,2 juta orang dari keseluruhan populasi yang ada dengan rentang usia sekitar 10-59 tahun. dengan angka revelansi yang mencapai 2 ini telah banyak dipergunakan oleh pekerja transportasi dalam satu tahun terakhir dimana *Hallucinogen*, *Transquilize*, *Opiad* dan *Inhalant* menduduki kategori rendah konsumsi seanyak 1%, ATS sebanyak 2,3% dan tertinggi ialah ganja sebesar 4,9% (Anggraini, 2006) terlihat adanya peningkatan yang begitu tinggi, dimana terlihat Pada tahun 2009 ke 2010

kasus narkoba meningkat 60,66% dari 11.140 kasus menjadi 17.898 kasus. Pada tahun 2010 ke 2011 hadapi kenaikan sebesar 6,87% dari 17.898 jadi 19.128 permasalahan. Sebaliknya pada tahun 2012 hadapi penyusutan permasalahan ialah dekat 0,25% dari 19.128 permasalahan jadi 19.081 permasalahan. Pada tahun 2013 kembali hadapi kenaikan 11,47% dari 19.081 permasalahan jadi 21.269 permasalahan. Setelah itu pada tahun 2014 kembali hadapi kenaikan sebesar 8,77% dengan 23.134 kasus (BNN, 2015). Penggunaan narkoba yang begitu banyak di Indonesia membuat Indonesia menjadi pasar narkoba yang cukup menjanjikan dimana ini sesuai dengan apa yang diprinsipkan dalam ekonomi yakni kebutuhan yang tinggi menyebabkan permintaan meninggi pula. Indonesia jelas mau untuk menjadi surga para pengguna narkoba melihat pasar yang menjanjikan ini, namun Indonesia sebagai anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) berupaya untuk mengurangi kasus-kasus penggunaan narkoba dimana hal ini telah diucapkan dalam Konferensi Joint Declaration for a Drug Free ASEAN 2015.

Drug Free ASEAN 2015

Adanya perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika serta obat bius di Asia Tenggara yang terus bertambah tiap tahunnya. Ditambah memandang permasalahan *drugs trafficking* yang selalu hadapi kenaikan, ASEAN mendeklarasikan Drug Free ASEAN 2020. Hendak namun, anggota ASEAN setuju buat memesatkan pelaksanaan Drug- Free ASEAN yang awal mulanya tahun 2020 diganti jadi 2015, perihal ini sudah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN. Sesuai dengan tujuan utama dari

kerjasama yang ASEAN lakukan yakni untuk mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba sehingga dapat membuat ASEAN menjadi kawasan bebas narkoba di tahun 2020 dan hal ini pun telah dicantumkan dalam ASEAN Vision 2020 serta Hanoi Plan of Action Drug Free ASEAN ini menghasilkan kawasan yang leluasa dari narkoba serta obat-obatan terlarang yang ditunjang dengan prosedur yang dibuat dan dilaksanakan dalam skala nasional dan internasional. Kerangka Kerja Regional ASEAN mengarah Drug- Free 2015 dibagi dalam ACCORD (ASEAN-China Cooperatative Operation in Response to Dangerous Drugs) serta ASOD (ASEAN Senior Officials on Drug matters). Drug Free mempunyai kerangka kerja regional buat pengendalian narkoba sejalan dengan rezim global serta tertuang dalam ACCORD rencana aksi. Rencana ini merupakan kerangka kerja berbasis kegiatan dengan fitur-fitur berikut:

- 1) Mempromosikan pemahaman warga serta reaksi sosial dengan secara proaktif mengadvokasi bahaya narkoba.
- 2) Kurangi mengkonsumsi obat- obatan terlarang dengan membuat komitmen dan pelaksanaan yang nyata untuk mengurangi permintaan.
- 3) Memperkuat supremasi hukum dengan jaringan aksi kontrol yang ditingkatkan serta hukum yang lebih baik kerjasama penegakan serta tinjauan legislatif; Melenyap kan ataupun secara signifikan kurangi penciptaan tumbuhan narkoba ilegal dengan tingkatkan program pengembangan alternatif (United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre, 2015)

Kerjasama Indonesia Thailand Thailand Goes To Campus

Pada tanggal 1-2 Oktober 2013 Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui berbagai kampanye dan ide-ide yang dituangkan dalam berbagai kegiatan positif. "Thailand Goes to Indonesia." mengunjungi sekolah-sekolah dengan maksud tujuan untuk mengampanyekan aktivitas penangkalan penyalahgunaan narkoba, selaku " *study visit*" serta riset banding. Aktivitas tersebut bertujuan buat menolong serta mendesak pemuda baik di Indonesia ataupun segala dunia, membagikan pemecahan kepada permasalahan-kasus narkoba dan memberikan ruang diskusi yang lebih luas dalam hadapi permasalahan narkoba. Tidak cuma itu, kunjungan tersebut bertujuan buat tingkatkan kepedulian kepada pemuda-pemudi, menyadarkan mereka hendak adanya peran dan tanggung jawab besar dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba disaat ini yang sudah berkembang dalam lingkup global serta salah memberikan informasi melalui peran pemuda dimana pemuda dapat berbagi informasi kembali kepada teman maupun keluarga. Mengenai tersebut diharapkan hendak membuka pemikiran pemuda yang hendak jadi generasi penerus bangsa betul-betul mempunyai andil besar dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba, mengingat banyaknya pemuda yang terjerat dalam permasalahan narkoba yang hanya menawarkan akibat instan maupun "instant effect" (Hukum Online, 2013). Dengan adanya edukasi seperti itu hal ini

memberikan edukasi baik bagi generasi-generasi muda akan buruknya penyalahgunaan narkoba dan supaya uraian seluruh anak muda di Indonesia senantiasa sama, kalau narkoba tidak hendaknya digunakan. Peredaran narkoba dapat dicoba lewat apa saja. Apalagi, terdapat sebagian metode yang bisa jadi sampai saat ini masih belum teridentifikasi, sehingga penyalahgunaan masih sangat bisa jadi terjalin. Area pemuda jadi sasaran empuk para pemasok sebab iming- iming khasiat yang bisa jadi didapat sehingga inilah yang dijadikan akar dari dibuatnya *Thailand goes to campus* yang dilakukan.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk lebih serius menekan angka pengguna narkoba dikalangan remaja secara khusus. Karena seperti yang kita tahu bahwa lingkungan usia muda sekitar 15-35 tahun sangatlah rentan akan adanya lingkaran narkoba. Tidak jarang para bandar narkoba menargetkan pemuda-pemuda atau anak usia remaja untuk menjadi target pasar mereka. Pergaulan mereka yang luas serta secara psikologis mereka yang rasa ingin tahunya masih sangat tinggi dan cenderung tidak berfikir Panjang membuat mereka mudah terjerumus dalam narkoba.

Bahkan, jika dilihat dari data terkini, Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif. Yang lebih menyedihkan lagi, dari angka tersebut, sebanyak 27% pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu merupakan jumlah yang cukup besar. Pelajar Indonesia yang seharusnya menjadi harapan masa depan Indonesia malah menjadi jumlah terbesar pengguna narkoba dan jika kita telaah Kembali, pelajar terlebih lagi mahasiswa

merupakan masyarakat yang berintelektual. Kebiasaan dalam menganggap narkoba merupakan pelanggaran yang ringan itulah yang sudah saatnya ditepis. Sejak usia dini sebelum mereka memiliki kemungkinana untuk mengenal narkoba sudah sebaiknya ditanamkan nilai-nilai anti narkoba sebagai antisipasi peningkatan tahun ke tahun.

Kegiatan Thailand Goes to Campus yang melibatkan dua negara ini, menjadi bukti implementasi dari bentuk Kerjasama Internasional yang pada dasarnya memiliki arti, suatu negara memiliki tujuan, arah serta keinginan yang sama yang didukung oleh kondisi yang saling membutuhkan (Kaetasmita, 1997). Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan pada satu titik. Menghentikan satu titik tidak akan menghentikan putaran narkoba yang sudah melibatkan banyak titik. Begitu pula dalam pencegahannya Kerjasama Indonesia dan Thailand merupakan bentuk dari Kerjasama Internasional itu sendiri karena miliki tujuan yang sama dengan saling membantu.

Kunjungan

Kunjungan juga coba dilakukan pada bentuk Kerjasama Indonesia dan Thailand contohnya: terdapat kunjungan untuk pemuda provinsi Banten di BNNP Banten yang diharapkan bisa melaksanakan perihal yang sama buat memiliki rasa kepedulian yang amat besar dalam mewujudkan (P4GN) mengarah Indonesia Leluasa Narkoba 2015. Kerjasama ini diadakan oleh Departemen Luar Negara Thailand, the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) serta the Ministry of Education and the Asia- Pacific Non-Government Organization on Drug and Substance Abuse Prevention dengan

Badan Narkotika Nasional Indonesia (Hukum Online, 2013). Dalam kegiatan ini, Kepala BNNP Banten menekankan dua hal penting yaitu pertama, apresiasi untuk Forkopimda yang sejauh ini terus memberikan dukungan pada kegiatan P4GN di Banten. Kedua, Banten diharapkan menjadi wilayah Bersih dari Narkoba atau Bersinar. Sebagai langkah persiapan menuju desa bersinar, dibutuhkan para penggiat anti narkoba yang handal. Karena itulah, BNN melatih seratusan personel dari unsur desa, untuk menjadi penggiat anti narkoba. Untuk mewujudkan wilayah bersinar ini, maka strategi yang ditempuh antara lain; melakukan upaya pencegahan, penegakkan hukum, rehabilitasi, sinergitas dengan instansi terkait dan peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat itu sendiri.

Melatih unsur desa mulai dari kepala desa hingga ketua RT atau RW guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan penggunaan serta penyebaran narkoba. Lokasi pedesaan tidak senantiasa menjamin bahwa akan terlepas dari narkoba. Rendahnya pengetahuan serta sarana informasi membuat masyarakat desa bisa saja menjadi sasaran narkoba. Karena itu pentingnya visi misi yang sama dari hulu hingga hilir, dari pemerintah pusat hingga perangkat desa.

Jika dalam ranah internal saja pemerintah sudah sepatutnya satu visi misi maka dalam skala internasional dimana persoalan narkoba ini merupakan persoalan yang transnasional sudah seharusnya saling bahu membahu, bantu membantu dalam pemberantasan narkoba. Kerjasama Indonesia-Thailand tidak hanya melibatkan pemerintah dalam penanggulangannya tidak melulu perihal perbatasan dan perundang-undangan.

Kerjasama Indonesia-Thailand juga melibatkan Non-Government Organisation (NGO), seperti dalam kunjungan di Banten yang melibatkan serta the Ministry of Education and the Asia-Pacific Non-Government Organization on Drug and Substance Abuse Prevention. Hal ini memberi bukti nyata implementasi kerjasama Indonesia dan Thailand yang melibatkan masyarakat didalamnya. Diharapkan semakin banyak NGO yang khususnya bergerak dalam bidang narkotika yang turut serta menjalankan visi misi Drug Free ASEAN ini.

Bentuk kunjungan Thailand ke Indonesia yang juga melibatkan NGO merupakan suatu kegiatan yang mengimplementasikan Kerjasama regional menurut Fawcett, regionalisme merupakan peraturan atau kebijakan di mana delegasi negara dan non-negara melakukan koordinasi dan kerjasama membentuk strategi dalam suatu wilayah regional. Hal tersebut merupakan koordinasi yang baik antara aktor negara dan non-negara yang menjadikan kegiatan ini merupakan implementasi dari adanya Kerjasama regional yang baik.

Pertukaran Informasi

Menurut Dhini Dwi Kerjasama Indonesia dan Thailand juga diperlihatkan oleh adanya komunikasi interaktif yang baik, “Intensifikasi komunikasi dan pertukaran informasi merupakan praktik yang berhasil dilakukan di kedua negara. Adanya ketersediaan informasi peredaran narkoba, terutama yang menuju ke Indonesia, memudahkan kita dalam melakukan langkah-langkah preventif, penangkalan dan deteksi dini ketika masuk ke wilayah Indonesia. Harapannya jaringan sindikat internasional dapat diungkap.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021).

Pertukaran informasi menjadi juga hal yang sangat penting, dimana kerjasama memiliki permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama serta tata cara buat mencapainya. Namun terletak pada pencapaian sasaran itu. Pertukaran data juga hendak diusahakan apabila khasiat yang diperoleh diperkirakan hendak lebih besar daripada konsekuensi- konsekuensi yang wajib ditanggungnya. Cocok dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan buat kesejahteraan bersama. Sebab ikatan kerjasama bilateral bisa memesatkan proses kenaikan kesejahteraan serta penyelesaian permasalahan diantara dua ataupun lebih negeri tersebut. Kemajuan informasi serta globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas tidak hanya memiliki dampak positif namun juga negative jika disalah gunakan. Kemudahan mendapatkan informasi menjadikan pergerakan narkoba menjadi sangat cepat dan luas. Memudahkan adanya transaksi, pengiriman barang dari negara satu ke negara lain, perkembangan obat-obatan itu sendiri dan lain lain. Variant narkoba selalu bergerak dinamis dan terus mengalami inovasi. Jenis-jenis baru yang bahkan kadang belum ditemukan mesin pendeteksinya. Ini pula yang membuat pemerintah kewalahan menghadapi perkembangan narkoba karena berjalan sangatlah kecepat. Disaat pemerintah belum benar-benar selesai mendeteksi variant sebelumnya dan belum sempat membuat aturan atau regulasi mengenai variant sebelumnya, para produsen narkoba sudah menghasilkan variant baru. Pemerintah dinilai lambat akan menghadapi fenomena narkoba ini. Pergerakan narkoba di luar sana tidak seiringan dengan apa yang pemerintah lakukan secara internal maupun eksternal.

Dengan adanya pertukaran informasi ini pemerintah tidak hanya bertukar informasi mengenai perbatasan, pengaman dan aturan-aturan saja, namun juga mengenai perkembangan jenis-jenis narkoba, pergerakan narkoba, pertukaran teknologi guna mempercepat proses pemberantasan narkoba seperti yang di harapkan. Pertukaran informasi inipun menjadi sarana komunikasi agar terciptanya hubungan yang harmonis antar negara serta mencegah akan adanya *miss communication* antar negara dalam hal ini Indonesia dan Thailand. Kembali lagi mengingat bahwa persoalan narkoba merupakan persoalan yang kompleks dan transnational, tidak dapat diselesaikan secara sebelah pihak, tentunya harus melibatkan negara lain.

Alternative Development

Menurut Dhini Dwi Mandiri, selaku Analisis Kerjasama Regional dan Internasional BNN:

“Inisiatif kerja sama bilateral antara BNN dan ONCB utamanya dilatarbelakangi oleh keberhasilan Thailand dalam bidang pemberdayaan alternatif. Thailand berhasil mengalihfungsikan budidaya tanaman ilegal yaitu opium menjadi budidaya tanaman lain yang produktif dan legal, serta membangun dan mendayagunakan kawasan bekas ladang opium dan masyarakatnya menjadi lebih berdayaguna.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021).

Program alternative development di Mukim Lamteuba telah dilakukan sejak tahun 2006. Program alternative development ini memberikan pengembangan alternatif, yang mencakup bantuan pertanian, dukungan akses pasar dan peningkatan infrastruktur, memberi

keluarga petani yang dahulu ialah petani opium penghasil yang stabil dan anak-anaknya kesempatan untuk hadir. sekolah dan rencana untuk pendidikan tinggi. Konservasi lingkungan, promosi pengelolaan sumber daya nasional dan perlindungan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati serta rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat diidentifikasi sebagai kunci ketika merencanakan dan menerapkan intervensi dan strategi pembangunan alternatif. lewat landasan Peraturan Presiden No 2005 dalam kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas pemerintah agar Indonesia menjadi negara bebas narkoba. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka pokok utama programnya ialah:

- 1) Hukum terkait narkoba ditingkatkan;
- 2) Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kapasitas ditingkatkan kemampuannya;
- 3) Rehabilitasi bagi para pecabdh ditingkatkan baik;
- 4) Komunikasi, instruksi, ataupun informasi ditingkatkan;
- 5) SDM, anggaran, administrasi, prasarana dan sarana ditingkatkan kualitasnya
- 6) Dalam PGN, partisipasi pemuda sangat diperlukan sehingga modelnya perlu dikembangkan;
- 7) Kampanye dan sosialisasi anti narkoba perlu diadakan
- 8) Mengembangkan penyidikan dan menegakkan hukum terkait pangan dan kesehatan. *Alternative development* ini berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari adanya penanaman tanaman yang legal yaitu nilam, jabon, kunyi dan lain-lain. Contohnya

seperti tanaman nilam yang dapat dimanfaatkan minyaknya saat panen dan jabon dalam kurung waktu relative tidak alam dapat dimanfaatkan kayunya. Program pemerintah dalam *alternative development* ini sangatlah rinci, hal ini belajar dari apa yang telah dilakukan Thailand terdahulu yang berhasil melakukan *alternative development*nya. Dengan dukungan berbagai lapisan dari pusat hingga lapisan RT dan RW serta kerjasama yang erat dan kooperatif antar dua negara ini membuahakan keberhasilan yang masih terus berjalan hingga saat ini. Implementasi dari Kerjasama Indonesia dan Thailand khususnya dalam *alternative development* ini merupakan bentuk dari Regionalisme yang berarti proses interaksi antara pihak internal dan eksternal yang mungkin tidak jauh secara geografis tetapi membentuk identitas politik atau ekonomi yang terletak pada skala yang sama (Hook, 2002). Kedekatan Indonesia dan Thailand juga dalam hal geografis mempermudah Indonesia dan Thailand dalam menjalin Kerjasama serta menemukan solusi yang tepat untuk implementasi dari *Alternative development* ini.

Law Enforcement

Menurut Dhini Dwi Mandiri selaku Analisis Kerjasama Regional dan Internasional BNN:

“Menurut saya, ini akan berhasil jika baik kita maupun negara yang bekerjasama dengan kita dalam hal ini Thailand, memperkuat hukum nasional terkait narkoba dan penegakannya. Juga memperkuat kerja sama baik bilateral, regional maupun internasional.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021).

Dalam kutipan wawancara tersebut peneliti melihat adanya penguatan hukum nasional yakni berbicara mengenai *law enforcement*, ini melihat dimana Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki hukum atau prinsip yang menerapkan atau memperkuat pencegahan, penegakan dan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari ASITF yang merupakan wadah para penegak hukum untuk berkolaborasi, koordinasi, serta mengambil inisiatif saat melakukan interdiksi lalu lintas peredaran narkoba. Salah satu tindakan itu yakni melalui cek poin di pelabuhan internasional yang berada di kawasan pelabuhan ASEAN (Eksa, n.d.). Sementara AITF yakni wadah terkait dengan tantangan dan masalah yang belum terpecahkan salah satunya narkoba, yang menggarisbawahi perlunya penelitian medis yang sedang berlangsung. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Thailand yakni juga dengan terus melakukan adanya komunikasi yang membuat satu sama lain terus melakukan adanya pertukaran informasi mengenai peredaran narkoba yang terjadi ini. Hal ini termasuk BNN dan ONCB juga bekerja sama di lingkup ASEAN melalui Satgas interdiksi laut. Beberapa kasus peredaran narkoba berjumlah besar berhasil digagalkan karena adanya pertukaran informasi antar negara ASEAN. Masing-masing negara dengan masing-masing prinsip melakukan Law Enforcement yang mana Thailand langsung membuat langkah berupa peningkatan rehabilitasi dan membagikan pengobatannya untuk para pecandu. Sebagai pengguna narkoba, sebagai ahli mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan rehabilitasi ataupun mengambil pengobatan karena takut akan ditangkap. Survey menyebutkan bahwa

pada 24 Maret - 4 April 2003 terdapat 3066 orang yang berada di pusat rehabilitasi dan 6% diantaranya belum pernah menggunakan narkoba, sedangkan 50%-nya memilih untuk berhenti menggunakan sebelum benar-benar kecanduan. Dengan survey yang dilakukan ditahun 2000, telah diperkirakan bahwa sebanyak 30.000 pengguna perlu dirawat dan direhab (Rights, 2004). Sementara, upaya yang dicoba buat menghindari penyalahgunaan narkoba di Indonesia ialah dimana BNN senantiasa membagikan edukasi pengetahuan bagi segala warga Banda Aceh (daerah rawan narkoba) tentang bahaya narkoba, baik penyuluhan di sekolah, baik data di jalan-jalan, semacam spanduk, jadi warga tau tentang bahaya narkoba. Setelah itu membagikan data kepada warga agar sadar mengenai bahaya narkoba, sebab narkoba bisa mengganggu psikologi sipemakai, bangsa serta negeri, kemudian pula merusak areamenasihati sekolah, melakukan urinalisis sebulan sekali dan berbagi ilmu dengan masyarakat, menyiarkan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah. Kemudian memasang spanduk di jalan-jalan dan memberikan penyuluhan di desa-desa. Perbedaan fokus antara Indonesia dan Thailand sangatlah wajar karena disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakatnya serta kesiapan pemerintahnya. Dalam pemecahan permasalahan narkoba ini, negara tak dipungkiri hanya akan bisa menyelesaikannya jika membentuk adanya kekuatan regional baik bilateral maupun multilateral untuk mencapai tujuan masing-masing menjadi tujuan bersama yang diagendakan karena sudah jelas akan adanya suatu prospek keuntungan timbal balik jika dilakukan adanya kerjasama atau kesamaan persepsi

soal ancaman eksternal yang terjadi ini. Gunanya ialah bukan hanya sebagai tujuan bersama namun juga sebagai suatu wadon dan modal untuk melakukan respon oleh adanya tantangan dari luar dan mengkoordinasikannya pada forum negosiasi atau pertemuan bilateral yang dapat dilakukan, nilai-nilai bersama yang dibangun dapat meningkatkan adanya interdependensi regional yang melahirkan sebuah keinginan bersama menyelesaikan permasalahan yang mengganggu adanya stabilitas kawasan. Negara memiliki tujuan, arah serta keinginan yang sama yang didukung oleh kondisi yang saling membutuhkan. Kerjasama ini berlandaskan kepentingan antar negara akan tetapi kepentingan tersebut tidak identik (Kaetasmita, 1997), dengan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan yang sama antara Indonesia dengan Thailand dalam pemberantasan narkoba dengan melakukan Kerjasama meski dengan adanya penyesuaian secara detail sesuai dengan keadaan negaranya masing masing.

Hambatan Kerjasama Penanggulangan Narkotika

Hambatan tentu ada dalam melaksanakan adanya tujuan bersama mengakhiri permasalahan narkoba ini, salah satu contohnya ialah permasalahan dana yang menghambat proyek alternative development yang sudah dinanti-nantikan dibangun di Indonesia, selain itu kurangnya kesadaran jika permasalahan ini memang permasalahan yang cukup sulit dihadapi dan kurangnya komitmen dari negara-negara ASEAN dalam banyak hal salah satunya kontribusi dana. Misalnya, Malaysia dan Laos saat semua negara memberikan dana untuk proyek yang akan dijalankan mereka justru tidak memberikan sedikit saja

kontribusi dana. Dalam segi perbatasan lemahnya pengelolaan perbatasan negara-negara Asia Tenggara sehingga memudahkan para kurir drug trafficking untuk mendistribusikan *drugs* keseluruh penjuru daerah yang memungkinkan dan strategis faktor geografis Asia Tenggara yang notabene penuh dengan hutan, pegunungan dan perairan membuat pengawasan sulit diterapkan. Ditambah lagi luas wilayah Asia Tenggara yang menghambat para pemangku untuk meminimalisir perjual belian narkoba. Disisi lain menurut Dhini Dwi Mandiri selaku Analisis Kerjasama Regional dan Internasional BNN RI:

“Hambatan dan tantangannya ialah dimana modus operandi dan jalur yang selalu berubah.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021)

Modus operansi ialah bagaimana cara pengoperasian kelompok penjahat yang membawa atau yang mengedarkan narkotika ini dalam menjalankan rencana kejahatannya. Lemahnya perbatasan dan lalainya negara-negara yang justru hanya berfokus pada keamanan tradisional seperti hanya memberantas sumber produksi saja namun pihak berwenang di Asia Tenggara mengalami kesulitan untuk membendung peredaran narkoba dari sumbernya. Kemudian perkembangan narkotika yang sangat massif dan terus menerus melahirkan jenis serta golongan obat baru yang membuat badan pengawas narkoba tidak hanya di Indonesia dan Thailand kewalahan untuk meriset dan mendeteksi narkotika tersebut.

KESIMPULAN

Isu narkoba tidaklah perihal yang baru, persoalan narkoba semakin lama semakin menjadi persoalan yang kompleks

yang mengancam keamanan sebuah negara dan sangat merugikan generasi bangsa. Menanggapi hal tersebut, ASEAN sudah tingkatkan komitmen buat mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Leluasa Narkoba 2015 (Drug-Free ASEAN by 2015). Deklarasi *Drug Free ASEAN 2015* inilah yang menjadi pedoman negara anggota ASEAN untuk turut serta menggalangkan pemberantasan narkoba khususnya di wilayah ASEAN.

Disadari bahwa persoalan narkoba bukanlah persoalan yang mudah dan merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara dalam pengedaran dan produksinya, Indonesia dan Thailand sebagai sesame negara anggota ASEAN membangun Kerjasama bilateral demi terciptanya lingkungan bebas narkoba di tahun 2015. Kerjasama itu berupa kunjungan sebagai bentuk kampanye anti narkoba kepada masyarakat desa dan pemuda mahasiswa sebagai tongkat estafet kesadaran anti narkoba. Kemudian pertukaran informasi yang melibatkan Indonesia dan Thailand untuk mempercepat adanya penyelidikan maupun informasi perkembangan jenis-jenis narkoba terbaru. Lalu, adanya *alternative development* sebagai pembangunan jangka Panjang pasca narkoba guna membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera secara fisik dan mental dan yang terakhir ialah, *law enforcement* yang di terapkan Indonesia dan Thailand sebagai keseragaman peraturan yang mengatur mengenai narkoba dan pencegahan serta parca narkoba.

REFERENSI

- Anggraini, D. (2006). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. 41.
- BNN. (2009). Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 23.
- BNN. (2015). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014. *Jurnal BNN RI*.
- BNN. (2018). *Badan Narkotika Nasional*. Retrieved from www.bnn.go.id
- Dhini Dwi Mandiri, S. (2021, oktober). Naskah Wawancara Sarah Tabitha Ramelan Dengan Dhini Dwi Mandiri. (S. Tabitha, Interviewer)
- Eksa, G. (n.d.). *Media Indonesia*. Retrieved from RI Serukan ASEAN Bersama Berantas Narkoba: <https://mediaindonesia.com/internasional/65598/ri-serukan-asean-bersama-berantas-narkoba>
- Emmers, r. (2002, November). *the Securitization of Transnational Crime in ASEAN*. Retrieved from <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP39.pdf>
- Hook, G. (2002). Regionalism. *Government and Politics*, 4-5.
- Hukum Online*. (2013, September 30). Retrieved from RI-Thailand Kerjasama Berantas Narkoba:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5249a38b25722/ri-thailand-kerjasama-berantas-narkoba>

Kaetasasmita, K. (1997). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre. (2015).

Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation. United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre.

UNODC. (2006). *Opium Poppy Cultivation in The Golden Triangle*. Retrieved from https://www.unodc.org/pdf/research/Golden_triangle_2006.pdf